

HANOI DAN ASIA TENGGARA *

Uraian ini adalah suatu tinjauan singkat mengenai hubungan sekarang ini antara Republik Sosialis Vietnam (SRV) dan organisasi ASEAN, yakni negara-negara Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura dan Thailand. Uraian terdiri atas suatu ikhtisar sebagai pembukaan, suatu penyelidikan mengenai situasi geopolitik terutama dari sudut pandangan Hanoi, suatu tinjauan atas masalah regional yang paling serius, Kamboja, dan menyimpulkan dengan meneropong hubungan perekonomian sekarang dan mendatang.

TINJAUAN SECARA LUAS

Ironi yang sangat tragis menandai sejarah Indocina akhir-akhir ini. Pemenang menjadi orang yang kalah ketika kemenangan militer berbalik menjadi abu dalam kekacauan setelah perang. Yang kalah lolos untuk menemukan sukses di lain-lain negara. Persaudaraan komunis yang penuh rahasia berubah menjadi perang saudara. Tetangga-tetangga yang cemas dan mengkuatirkan malapetaka yang paling buruk, segera menemukan bahwa ketakutan yang mencekam mereka lenyap dan keadaan mereka menjadi semakin baik dengan memburuknya nasib komunis Indocina.

Ketika perang Vietnam berakhir, bulan Mei 1975, para pemimpin Hanoi memasuki dunia setelah perang penuh dengan banyak masalah sulit, sebagian

*Terjemahan makalah Douglas Pike, *Hanoi Looks to the Southeast* yang disampaikan pada Konferensi Amerika Serikat-ASEAN mengenai masalah-masalah ekonomi, politik dan keamanan Asia Tenggara dalam tahun 1980-an, Bali 2-5 Nopember 1981, yang disponsori CSIS dan Institute of East Asia Studies University of California, Berkeley, California. Penterjemah adalah Oct. Ovy NDOUK, Staf CSIS.

nyata atau material dan sebagian imaterial atau psikologis. Dua masalah utama dihadapkan pada mereka: mengubah sektor ekonomi perang menjadi ekonomi masa damai, yang juga menuntut suatu pengaturan transisi sosial-politik di daerah Selatan yang baru direbut; dan, menjalin hubungan luar negeri yang dapat berfungsi jika tidak bersahabat, terlebih dengan Cina, sementara tugas pemulihan akibat perang diselesaikan. Tugas-tugas ini sulit tetapi bukan tidak teratasi dan harus (harus dapat) ditangani dengan cepat.

Pejabat-pejabat Hanoi mengerahkan diri mereka sendiri dengan penuh semangat kerja akan tetapi usaha-usaha mereka lebih mempersulit daripada melenyapkan masalah-masalah itu. Segera situasi Vietnam Utara dan Selatan, berkembang menjadi kegagalan yang kacau balau dan hampir total. Bukannya berkembang menjadi hari esok perkembangan ekonomi yang cerah, Vietnam semakin memburuk sampai titik, saat ini, di mana situasi ekonomi berdasarkan indeks manapun yang digunakan, adalah lebih buruk daripada di hari-hari paling gelap pada waktu perang.

Di luar negeri, tahun-tahun sesudah perang sama-sama suram. Vietnam bukannya berlayar menuju pusat arus dari masalah-masalah dunia, seperti tujuan semula, melainkan menemukan dirinya terkepung, terisolasi dalam keterbelakangan. Vietnam menjadi tidak berteman di kawasan dan berbagai hubungannya bukan hanya tidak jalan, tetapi juga putus dengan sendirinya. Posture strategis Hanoi beralih ke suatu titik yang tak seorangpun membayangkan kemungkinannya lima tahun sebelumnya; suatu saat Vietnam bahkan bertempur di dua front.

Kemungkinan besar tak satupun dari hal ini diantisipasi oleh 17 orang Politbiro di Hanoi yang sekarang mengelola Indocina. Dalam bulan Mei 1975 mereka hanya mengenal kesukariaan dan optimisme tak terbatas hasil kemenangan. Namun kalau Vietnam saat ini diganggu masalah-masalah, hal ini terutama adalah kesalahan ketujuhbelas orang tersebut. Mereka membuang kesempatan yang diberikan oleh kemenangan militer, terutama karena secara psikologis mereka tidak dapat melakukan sesuatu lain. Sejarah sejak tahun 1975 adalah sejarah keputusan kebijakan yang buruk secara terus menerus, suatu rangkaian kesalahan yang panjang dan tak terputuskan. Sekarang menjadi jelas; ketujuhbelas orang itu dapat dan menangani suatu perang yang kompleks secara cukup efisien -- mereka memiliki mental yang ulet (beberapa orang menyebutnya fanatik) yang diperlukan -- tetapi sama sekali tidak mampu menghadapi tantangan kepemimpinan waktu damai. Mereka benar-benar tidak mempunyai keahlian untuk membimbing suatu masyarakat yang semi berkembang menuju pembangunan ekonomi. Kecenderungan-kecenderungan gila mereka mencegah mereka menjalin hubungan yang bersahabat dengan tetangga mereka, suatu prasyarat bagi setiap perbaikan ekonomi dan sosial

yang berarti. Mereka telah membuat serangkaian keputusan yang menyebabkan mereka kehilangan teman, dikepung oleh musuh-musuh yang kebanyakan adalah bekas teman.

Kegagalan ini tidak perlu terjadi. Seandainya terjadi perubahan arah yang rasional di Hanoi dan para pemimpin berpikir kembali pada akhir perang, sejarah akan berbeda sekali. Sebagian kesalahan seperti disebutkan terletak pada para pemimpin. Tetapi kegagalan kepemimpinan juga merupakan suatu gejala. Lebih mendasar, kegagalan adalah akibat pengaturan pemerintahan Hanoi yang hampir tidak dapat dilaksanakan. Masalah utamanya, seperti dikatakan oleh orang Perancis, adalah *le systeme*. Vietnam dibebani oleh suatu birokrasi yang kacau balau, suatu kompleks pada unsur-unsur Partai, Negara dan Organisasi Masa, semuanya terkunci sejalan dengan prinsip sentralisasi total, semuanya digerakkan oleh obsesi pengawasan total. Kemungkinan aparat kelembagaan ini, seperti kepemimpinan, adalah tepat untuk mencapai suatu tujuan tunggal, seperti kemenangan dalam perang. Tetapi struktur itu adalah yang mungkin paling jelek dalam masa damai. Ia terlalu berat dan lamban untuk mengijinkan pembangunan ekonomi yang cepat. Ia terlalu kaku untuk mengijinkan hubungan luar negeri yang ramah tamah. Dengan polanya itu ia tidak dapat mendesentralisasikan pembuatan keputusan, bahkan apabila hal itu jelas diperlukan. Ia tidak mampu menyebar tanggung jawab bagi perubahan sosial ke kader-kader tingkat menengah. Paling buruk dari semuanya itu, ia tidak dapat mengendor secara umum, sehingga mengijinkan berbagai sektor masyarakat maju secara sejalan.

Pada akhir perang, perubahan adalah suatu keharusan bagi Hanoi, tetapi ia tidak dapat berubah karena ia dan Politbironya adalah tawanan suatu sistem yang tak dapat diubah. Sekarangpun mereka masih tawanan.

HUBUNGAN GEO-POLITIK

Akibat perang Vietnam, kemenangan komunis, akan menciptakan suatu perimbangan kekuatan yang baru di Asia Tenggara. Vietnam (atau Federasi Indocina seperti anggapan sementara orang sekarang) adalah suatu kekuatan yang besar dengan tentara keempat terbesar di dunia yang diperbesar oleh dukungan militer besar-besaran yang langsung diberikan Uni Soviet. Hal ini telah menyebabkan perubahan sikap di Asia Tenggara, tidak hanya terhadap Vietnam tetapi juga terhadap Cina dan, dalam cara yang berbeda, terhadap Amerika Serikat, suatu perubahan yang berlanjut.

Kepentingan keamanan orang-orang Vietnam di Asia Tenggara tampaknya empat ganda. Pertama, ada suatu pemikiran yang kuat sekali untuk men-

dapatkan suatu kawasan penurut yang tidak mengancam; terutama sekali ini berlaku untuk Jazirah Indocina. Kedua, mencegah berkembangnya suatu front anti komunis, baik suatu ASEAN yang militan, suatu revisi SEATO maupun kelompok regional lainnya yang memusuhi Vietnam. Ketiga, melenyapkan kehadiran militer Amerika Serikat dari kawasan dan mengurangi pengaruh umum Amerika Serikat. Keempat, membatasi kegiatan superpower di kawasan, termasuk RRC dan (tanpa tampak berbuat demikian) Uni Soviet.

Di samping keempat kepentingan dasar ini, yang tampak jelas dan tidak dapat diragukan, mungkin terdapat kepentingan-kepentingan lain. Satu kepentingan yang paling biasa disebutkan (atau dituduhkan) adalah ambisi imperial.

Perimbangan kekuatan regional Asia Tenggara hanya kalah penting dari Cina dalam pemikiran jenderal-jenderal Hanoi bila memikirkan keamanan Vietnam. Sekarang, sebagai akibat sampingan hasil perang Vietnam terdapat suatu perimbangan baru yang harus diukur. Para perencana militer Vietnam, yang memusatkan perhatian mereka pada suatu pelengkung strategi besar yang membentang dari Taiwan ke Birma, menemukan bahwa perkiraan-perkiraan di sini paling sulit dibuat. Apakah tahun-tahun mendatang ini akan melihat suatu polarisasi kekuatan geo-politik di Asia Tenggara, dengan Hanoi sebagai satu kutub dan, katakan Jakarta sebagai kutub lain, semacam persaingan perimbangan kekuatan abad ke-19? Ataupun akan melihat suatu kelompok semenanjung (Indocina, Thailand, Malaysia, Singapura, Birma) lawan kekuatan-kekuatan lepas pantai (Indonesia, Pilipina)? Dapatkah pertarungan itu menggerakkan suatu usaha bersama untuk menggulung komunisme di Indocina, barangkali tidak menyerang Vietnam tetapi negara-negara yang lebih lemah Kamboja atau Laos?

Perlakuan khusus Vietnam (SRV) terhadap negara-negara Asia Tenggara dalam tahun-tahun setelah perang biasanya tidak menentu, suatu saat "diplomasi senyum" dan di lain saat retorika galak (khususnya terhadap Thailand). Kebijakan dasar diletakkan pada pertengahan 1976 oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Duy Trinh dalam suatu muhibah di kawasan. Secara resmi, program 4 pasalnya tetap berlaku sekarang ini.

1. Hubungan luar negeri harus didasarkan pada saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial, prinsip nonagresi dan non-intervensi dalam masalah-masalah dalam negeri, dan pada persamaan dan koeksistensi damai;
2. Tak satupun negara di Asia Tenggara dapat diijinkan menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan untuk agresi langsung atau tak langsung terhadap negara lain di kawasan itu;

3. Pengembangan kerja sama ekonomi dan pertukaran kebudayaan diutamakan; perselisihan yang berkembang (atau yang belum diselesaikan) akan dirundingkan berdasarkan persamaan, saling pengertian dan saling menghormati;
4. Kerja sama regional harus berusaha memajukan kesejahteraan, kemerdekaan dan perdamaian.

Bertahun-tahun Hanoi secara terbuka memusuhi ASEAN sebagai suatu organisasi, dan menunjukkan bahwa Vietnam lebih senang untuk berhubungan dengan masing-masing negara atas dasar bilateral. Posisinya itu paling jelas terungkap sehubungan dengan gagasan netralisasi kawasan ASEAN. Reaksi pertama Vietnam, tahun 1971, adalah mendukung secara hati-hati kalau, Hanoi mengatakan, netralisasi berarti bahwa semua kekuatan militer Amerika Serikat akan didorong keluar dari kawasan itu. Ini mungkin hanya suatu taktik. Dalam tahun-tahun setelah perang Vietnam menyatakan minat atas netralisasi sampai tingkat hal itu berarti bahwa kawasan akan menjadi zone bebas nuklir. Pada pertengahan tahun 1978, ketika kesukaran dengan Beijing melipatganda, Hanoi menunjukkan minat baru atas gagasan netralisasi. Akan tetapi pada saat itu sikapnya telah mendapat nada yang jelas anti Beijing, pro-Moskow.

Negara-negara ASEAN takut akan apa yang bisa dilakukan Hanoi dan dengan alasan baik, mengingat kemampuannya yang telah terbukti untuk menempa dan mengelola suatu organisasi senjata dan membuat kemauannya dirasakan pada jarak yang jauh. Orang-orang Vietnam mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk membangkitkan suatu pemberontakan dimanapun di Asia Tenggara. Mereka bisa menjadi orang-orang Kuba-nya Uni Soviet di Asia, sebagaimana dinyatakan harian Beijing. Tidak dapat disangsikan bahwa mereka mempunyai potensi untuk membuat kekacauan. Tetapi seberapa banyak keprihatinan negara-negara ASEAN ini dibenarkan/beralasan? Secara realistik, apakah sifat ancaman yang datang dari Hanoi? Negara-negara ASEAN menerima jaminan Hanoi dan ingin mempercayainya. Tetapi keragu-raguan dengan kecurigaan dan ketidakpastian tetap. Yang diragukan adalah apakah Vietnam mau menerima struktur sosial ekonomi yang dilaksanakan ASEAN sekarang ini sebagai suatu keadaan yang permanen dan tidak akan mengorganisasi, melatih dan membiayai pemberontakan-pemberontakan lokal untuk mengubah negara-negara ASEAN menjadi republik rakyat. Yang tidak pasti adalah seberapa jauh Vietnam akan bersedia melaksanakan jaminannya, yaitu berapa harga akan dibayarnya, resiko apa akan diambilnya. Lain keinginan, lain lagi pengorbanan.

Hanoi mempunyai suatu tujuan jangka panjang di kawasan -- menjadi kekuatan yang terkemuka -- dan juga suatu strategi serangan, walaupun

bukan serangan dengan tank atau senjata-senjata konvensional. Hanoi tidak memandang pemerintah-pemerintah Asia Tenggara sah maupun tahan lama, tetapi lebih beranggapan bahwa kawasan ini bergerak menuju suatu rangkaian republik rakyat. Hanoi akan mendesak dan mendorong kejadian-kejadian ke arah itu, memanfaatkan perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan di mana ditemukan, membiayai pemberontak-pemberontak lokal jika tampak memberi harapan, dan mengajukan doktrin bahwa kawasan itu sebaiknya menjauhkan diri dari ekonomi pasar negara-negara Barat dan Jepang.

KAMBOJA

Problem yang paling penting dan barangkali paling sulit di Asia Tenggara saat ini adalah Kamboja. Masalah ini mungkin bukan penyebab semua kesulitan kawasan tetapi jelas ikut menyebabkannya. Banyaknya masalah ekonomi Hanoi sebagian tidak kecil adalah akibat peperangannya di Kamboja, suatu perang yang bagaikan suatu virus beracun menyerang semua orang ke segala penjuru. Hubungan luar negeri Vietnam, di kawasan dan di luarnya, menjadi polarisasi terutama akibat tindakannya di Kamboja. Thailand tetap merasa cemas akibat perbatasannya dengan Kamboja yang mengganggu dan jumlah pengungsi Khmer yang sangat besar yang harus dibantunya. Cina, terangsang oleh apa yang dianggapnya sebagai pembentukan imperium Vietnam, melancarkan suatu serangan terbuka terhadap Vietnam dan berusaha untuk terus melemahkan Vietnam. Penyerbuan ke Kamboja mendorong negara-negara ASEAN ke arah suatu pengaturan kerja sama militer baru yang oleh banyak orang dianggap tidak sehat. Dukungan Uni Soviet bagi petualangan Vietnam di Kamboja -- membiayai perang di sana dan mendukung usaha itu secara diplomatis di PBB -- minta biaya yang mahal dalam bentuk prestise, karena menjatuhkan nama baik Moskow di Asia Tenggara sampai ke tingkat yang paling rendah selama lebih dari satu dekade. Hampir setiap perkembangan dan setiap hubungan di seluruh kawasan telah dipengaruhi -- dan hampir selalu secara yang merugikan -- oleh situasi di Kamboja. Terdapat segala alasan untuk mengira bahwa keadaan pokok ini akan terus berlangsung sampai dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

Apa yang diperlukan di Kamboja adalah suatu pengaturan pemerintahan baru yang dapat diterima baik oleh ketiga unsur yang bertengkar maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan. Pengaturan ini harus menggabungkan semua kekuatan besar yang bertengkar dan bukan hanya boneka Hanoi. Hal itu akan menuntut agar dibuat suatu konsesi yang sungguh-sungguh bagi nasionalisme Khmer. Pada saat ini tidak tampak satu saranapun yang sangat memberi harapan. Barangkali pendekatan yang paling mungkin adalah melalui suatu konferensi internasional.

Kamboja merupakan suatu ujian bagi ASEAN seperti, dalam arti lain, bagi Vietnam. Hanoi mengharapkan agar invasinya ke Kamboja bulan Desember 1978 menghancurkan sistem pemerintahan Pol Pot, dan secara demikian menyebabkan kebanyakan orang Khmer mendukung rezim Heng Samrin, dan agar di negara itu dicapai perdamaian dalam waktu 6 bulan, dan secara itu Indocina bergerak satu langkah menuju federasi. Harapan ini tidak menjadi kenyataan. Yang akan tetap menjadi sasaran ASEAN di Kamboja adalah penarikan pasukan-pasukan Vietnam dan pembentukan suatu pemerintahan pribumi, yaitu suatu pemerintahan yang berakar pada nasionalisme Khmer.

Secara geopolitik Kamboja akan tetap merupakan semacam penghubung (stand-off). Hasil akhir kejadian-kejadian di sana sebagian besar akan bergantung pada dukungan dan bantuan militer dari luar bagi kekuatan-kekuatan anti Vietnam, dan ini terutama berarti akan bergantung pada maksud-maksud Cina. Pangeran Sihanouk merupakan harapan terbaik ASEAN bahwa kejadian-kejadian di Kamboja akan mengambil suatu arah yang menguntungkan baginya.

HUBUNGAN EKONOMI REGIONAL

Secara ekonomi yang biasa, hubungan Vietnam - Asia Tenggara tidak rumit. Hanoi memandang kawasan itu sebagai suatu pasar perdagangan. Singapura adalah langganan Non-Blok Vietnam yang ketiga terbesar (setelah Jepang dan Hongkong), Malaysia dan Pilipina juga berdagang dengan Vietnam. Tetapi ini terbatas, terutama karena Vietnam mempunyai sedikit produk yang diinginkan oleh negara-negara di kawasan itu, dan hanya memiliki sedikit devisa untuk membeli barang-barang. Vietnam telah menerima bantuan ekonomi, untuk pembangunan kembali kerusakan akibat perang, dari beberapa negara di kawasan itu meskipun kebanyakan hanya lambang saja.

Dalam arti yang lebih luas masalah pokok bagi Vietnam di Asia Tenggara adalah doktriner. Ini adalah apakah Vietnam dapat menerima, secara kelembagaan, sistem-sistem ekonomi (dan masyarakat) kawasan itu seperti adanya sekarang atau apakah demi kepentingan Vietnam sistem-sistem itu harus didesak ke kiri. Di Hanoi teoritikus yang menangani hal ini akan bertanya: Dapatkah negara-negara Asia Tenggara menjadi kapitalis dan sekaligus juga benar-benar merdeka? Kemerdekaan sebagaimana dibatasi oleh orang-orang Vietnam, adalah maha penting. Tetapi tentu saja ideologi bukan satu-satunya faktor, seperti kita lihat, karena kebutuhan-kebutuhan keamanan nasional juga ikut bicara.

Dari segi pragmatis dan barangkali juga strategis dapat dikemukakan bahwa Vietnam membutuhkan kawasan itu secara ekonomis, bahwa ia sulit membangun perekonomiannya tanpa kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi bukanlah kepentingan Vietnam merongrong suatu masyarakat yang sudah ada atau bahkan perekonomiannya. Para ahli ideologi Hanoi akan menjawab bahwa kebijakan seperti itu tidak hanya secara ideologis tidak tepat tetapi juga dengan sengaja menghindari kesempatan-kesempatan strategis dan ekonomi.

Pentingnya pendekatan ideologis Vietnam ini, menurut beberapa peninjau, ialah bahwa ia menunjukkan taktik dasar Hanoi yang akan digunakan dalam dekade mendatang ini, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga dalam urusan luar negeri umumnya. Hal itu menopang dan memperjelas hipotesa bahwa Vietnam bermaksud membentuk suatu front persatuan anti kapitalis seluas dunia, sambil menugaskan dirinya sendiri untuk mempolarisasikan Asia Tenggara secara ekonomi, dan mengakhiri hubungan ekonomi ASEAN dengan negara-negara kapitalis dan perusahaan-perusahaan multinasional dari luar.

Jadi pertanyaannya -- yang bukan pertanyaan retorik -- adalah: Dapatkah perjuangan perdamaian di Asia Tenggara dibantu dengan langkah-langkah rukuk dengan Hanoi dalam sektor ekonomi? Beberapa peninjau mengira bahwa jawabannya adalah ya; tetapi kebanyakan tidak. Inilah suatu pertanyaan yang memerlukan pemeriksaan yang lebih lengkap dan tidak hanya suatu putusan yang tergesa-gesa. Kemungkinan adalah keliru mengira bahwa Hanoi dapat ditangkal tingkah lakunya dengan hubungan ekonomi. Tampaknya pertimbangan-pertimbangan ekonomi saja bukan faktor yang menentukan. Secara ekonomis, adalah kepentingan Vietnam mempunyai hubungan-hubungan yang harmonis dengan Kamboja. Secara ekonomis Vietnam harus melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membiarkan arus makanan dan barang-barang konsumsi dari Cina. Namun dalam kedua kasus itu kebutuhan ekonomi sedikit artinya. Faktor-faktor lain mengalahkan pertimbangan ekonomi.

Akan tetapi kita tidak boleh bersikap dogmatis mengenai masalah itu. Hanya waktu akan mengatakan apakah Hanoi akan dapat menyesuaikan hubungan keluarannya dengan kebutuhan ekonominya, dan jika demikian, sejauh mana.

Jika suatu perang dingin ekonomi berkembang -- misalnya, jika Vietnam melancarkan kampanye front persatuan anti kapitalisnya -- persaingan ASEAN - Vietnam (SRV) akan menjadi suatu permainan zero sum, yang dimenangkan yang satu berarti kekalahan pihak yang lain. Pemimpin-

pemimpin di Asia Tenggara yang bermental dagang bukannya tak menyadari bahwa memperkuat persaingan merugikan dirinya sendiri.

Akhirnya terdapat argumen praktis melawan hubungan ekonomi yang erat dengan Vietnam, yakni bahwa hubungan tidak dapat dijalin. Adalah tidak realistis, kata penganut pendapat itu, untuk mengira bahwa Vietnam dapat terjaring dalam suatu jaringan hubungan ekonomi yang akan memperlunak sikapnya dan meminta (atau memaksa) kerja samanya karena usaha seperti itu akan dianggap Hanoi sebagai penjeratan. Pengaturan seperti itu harus dihindarkan, Hanoi akan berpikir, semata-mata karena hal itu diusulkan oleh musuh. Jika negara-negara kapitalis menginginkannya, hal itu harus merupakan suatu perangkap.

Tak satupun dari hal-hal itu mengisyaratkan suatu larangan terhadap hubungan ekonomi dengan Vietnam. Hal ini jelas tidak dimaksudkan sebagai suatu perintah untuk mengucilkan Vietnam dari Asia Tenggara, atau melancarkan suatu perang dingin ekonomi terhadapnya (bahkan kalau ia menyampaikan tantangan perang semacam itu). Harus ada, dan akan ada, hubungan ekonomi. Tanpa hubungan itu Vietnam akan menjadi seekor gajah yang sendirian di rimba Asia Tenggara. Beberapa kegiatan ekonomi mungkin tidak melayani kepentingan Amerika Serikat atau dunia kapitalis, tetapi masih dapat dilihat sebagai suatu harga yang pantas dibayar.

Yang harus menjadi pedoman bagi ASEAN (dan Amerika Serikat) adalah perspektif sejarah, yang meninjau setiap usul hubungan ekonomi secara luas, tidak hanya dari segi ekonomi jangka pendek tetapi juga dari segi keamanan jangka panjang. Negara-negara ASEAN terutama sekali harus menjamin agar hubungan itu tetap longgar, *ad hoc*, dan tentatif/mencoba-coba, agar ASEAN tidak menderita kerugian kelembagaan tanpa menyadarinya, -- agar hubungan itu bermanfaat baik di luar dan di dalam. Bagi semua pihak, permainan yang tepat yang harus dimainkan adalah permainan menunggu. Taruhannya adalah waktu -- waktu yang akan mengganti pimpinan pengawal lama Vietnam, waktu yang akan memberikan kekuasaan di Hanoi kepada penguasa-penguasa yang secara ideologis kurang imperial, yang benar-benar bersedia untuk hidup dan membiarkan hidup dengan dunia.